



# LAPORAN AKHIR

## P3PD DESA INKLUSI DAN AKUNTABILITAS SOSIAL SUB KOMPONEN 2B T.A. 2023 – 2024

**KABUPATEN POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO**

***Tim Penyusun***

**Sumiyati Muda**

**Nursela Hippy**

**Rahmatullah Haras**

## Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan akhir pelaksanaan Program P3PD Sub Komponen 2B untuk Desa Inklusi dan Akuntabilitas Sosial ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama program berlangsung, sekaligus sebagai dokumentasi dan evaluasi perbaikan di masa mendatang.

Program Desa Inklusi dan Akuntabilitas Sosial bertujuan menciptakan desa lebih inklusif, transparan, dan partisipatif. Dalam konteks ini, inklusi berarti melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang, serta memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan marjinal seperti perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

Program ini berfokus pada pengembangan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan transparansi tata kelola pemerintahan desa. Melalui berbagai kegiatan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung keberagaman dan menghargai hak setiap individu.

Laporan ini memuat informasi penting terkait pelaksanaan program, mulai dari latar belakang hingga hasil dan dampak yang telah dicapai. Kami menyajikan analisis tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program serta rekomendasi untuk keberlanjutan program di masa mendatang. Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dievaluasi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kami menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Terima kasih kepada Dinas PMD Kabupaten Pohuwato, Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, pemerintah desa, masyarakat, serta mitra kerja lainnya. Dukungan dan kolaborasi yang solid telah menjadi kunci keberhasilan program ini.

Kami menyadari laporan memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat kami harapkan guna menyempurnakan laporan ini di masa akan datang. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi berguna bagi pengembangan program serupa di masa mendatang.

## **Kata Pengantar**

Semoga dengan adanya program Desa Inklusi dan Akuntabilitas Sosial ini, kita dapat bersama-sama membangun desa yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah desa dan masyarakat, kita dapat mewujudkan visi inklusif yang tidak hanya memberikan akses kepada semua orang tetapi juga memberdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

**Pohuwato, Desember 2024**

**TIM PENYUSUN**

## 1. PENDAHULUAN

Isu inklusi sosial mendapat perhatian dalam agenda pembangunan global yaitu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Setidaknya ada 4 goals dalam SDGs yang mensyaratkan agenda pembangunan yang inklusif untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, yaitu pendidikan yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi & pekerjaan yang layak, mengurangi ketimpangan, serta keberlanjutan pembangunan kota dan komunitas. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal telah mengadopsi gagasan SDGs sebagai panduan dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif sejak tahun 2020-2024.

Walaupun demikian, persoalan eksklusi sosial masih menjadi tantangan dalam pembangunan di seluruh wilayah, tidak terkecuali di wilayah desa dan perdesaan. Persoalan pengucilan sosial tidak selalu terkait dengan ketimpangan pendapatan, akan tetapi juga stigma, diskriminasi, serta segregasi sosial atas nilai, tradisi dan budaya, maupun atas dasar kepercayaan. Pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat regulasi dan kebijakan yang dijadikan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan posisi yang setara sebagai warga negara. Misalnya regulasi yang terkait dengan hak asasi manusia.

Dalam konteks pembangunan desa, nuansa eksklusi dapat diprotret secara kewilayahan. Desa-desa yang berada di lokasi yang terpencil dan memiliki tingkat kesulitan geografis yang tinggi dapat mengalami pengucilan sosial karena ketiadaan infrastruktur layanan dasar maupun masyarakatnya sulit mengakses layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Pada pendampingan Program P3PD Sub Komponen 2B di Kawasan Timur Indonesia, masih juga ditemukan nuansa pengucilan sosial pada beberapa kelompok sosial. Misalnya pada kelompok masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, maupun juga kelompok masyarakat adat. Bentuk pengucilan sosial yang lazim ditemukan di desa biasanya dalam bentuk kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan dasar, serta belum adanya keberpihakan pemerintah desa terhadap kebutuhan kelompok rentan dan marjinal. Program P3PD Sub Komponen 2B menggunakan pendekatan sekolah lapang sebagai instrumen untuk membangun kapasitas kelompok rentan dan marjinal, sekaligus sebagai wadah untuk mendorong integrasi sosial di masyarakat.

Tahun 2023 Kemitraan Partnersip dan NGO local/JAPESDA telah melakukan Tahapan pelaksanaan program pendampingan Program P3PD Sub Komponen 2B di Kabupaten Pohuwato mendampingi 4 Desa Pilot : ( Desa Panca Karsa II, Desa Bumbulan, Desa Mootilango dan Desa Taluduyunu ) dan di tahun 2024 ada 4 Desa Pilot : ( Desa Sipayo, Desa Popaya, Desa Padengo dan Desa Pohuwato ) Total Desa dampingan Delapan desa yang diawali dengan

tahapan survey baseline data desa untuk mengidentifikasi jenis kerentanan, serta hambatan yang dihadapi oleh kelompok rentan dan marginal maupun masyarakat desa baik dalam mengakses layanan dasar. tahapan ini dapat mengidentifikasi informasi kondisi Desa, Kondisi kelompok rentan marginal, dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan marginal dengan adanya Baseline data bisa menjadi dasar dalam menyusun dan mengidentifikasi perencanaan program yang bisa di support oleh P3PD Sub Komponen 2b Dan program lain yang baik program Desa /Daerah.

Tahapan ini juga sangat bermanfaat dalam menyusun kebutuhan materi dalam pelaksanaan Sekolah lapang yang disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas kelompok rentan Marginal, dan menjadi salah satu strategi mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan marginal. Dari Delapan Desa dampingan di tahun 2023-2024 melibatkan Total Partisipasi 240 Perwakilan Responnden (93 Orangaki-laki dan 147 Orang Perempuan) yang merupakan keterwakilan dari kelompok rentan margina (Kelompok Perempuan, Perwakilan Perempuan Kepala Keluarga, Perwakilan Lansia, Perwakilan Pemuda, Perwakilan Disabilitas, Perwakilan kelompok masyarakat /KK Miskin, Petani/Nelayan/Buruh Tani, Perwakilan UMKM Dan perwakilan dari pemerintah Desa, BPD, BumDes.

Isu Kelompok rentan Marginal di Delapan Desa dampingan yang teridentifikasi pada tahapan baseline data adalah di Delapan Desa pilot sebagian besar isu :keterbatasan akses Informasi terhadap peluang usaha yang dikembangkan oleh UMKM Kelompok perempuan Rentan, dan masih Rendahnya SDM masyarakat rentan dalam mengembangkan potensi desa yang merupakan peluang dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatan Kelompok perempuan rentan marginal dan masyarakat desa, belum maksimalnya partisipasi kelompok rentan marginal dalam musyawarah desa sehingga berdampak pada belum meratanya program desa khususnya untuk program penguatan kapasitas/pemberdayaan masyarakat rentan marginal, perencanaan dan penganggaran desa belum memprioritaskan kegiatan/kebutuhan kelompok perempuan dalam mengelola potensi unggulan Desa, belum terbukanya Akses informasi pasar terkait produk olahan pangan yang di kembangkan UMKM Kelompok perempuan/Rentan marginal, Belum adanya Forum/Kader yang khusus menampung aspirasi kelompok rentan marginal, Belum adanya Regulasi Desa yang bisa menjadi dasar rekomendasi kegiatan penganggaran Dana Desa mensupport kegiatan kelompok Rentan marginal. Isu Kelompok rentan marginal menjadi salah satu Program – Program strategis pelaksanaan kegiatan Sekolah lapang dan Non Sekolah lapang yang dilaksanakan di Delapan Desa Pilot.

## 2. Lokasi Pendampingan & Gambaran Situasi Desa

Lokasi yang menjadi sasaran pendampingan desa inklusif di Kabupaten Pohuwato berjumlah 8 desa sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**DAFTAR DESA LOKASI P3PD SUB KOMPONEN 2B REGIONAL INDONESIA TIMUR**

1	Panca Karsa II	Lokus Dampingan 2023-2024
2	Bumbulan	Lokus Dampingan 2023-2024
3	Mootilango	Lokus Dampingan 2023-2024
4	Taluduyunu	Lokus Dampingan 2023-2024
5	Sipayo	Lokus Dampingan 2024
6	Popaya	Lokus Dampingan 2024
7	Padengo	Lokus Dampingan 2024
8	Pohuwato	Lokus Dampingan 2024

## 3. Permasalahan Kelompok Rentan & Marjinal

Hasil baseline data dan observasi yang dilakukan selama proses pendampingan, menemukan beberapa persoalan dan tantangan pada kelompok rentan dan marjinal sebagai berikut:

3.1 Masih Banyak Kelompok Rentan dan Marginal yang belum maksimal mengakses layanan dasar air bersih-sanitasi

Di Desa Mootilango sebagian warga dusun 3 Sangat sulit mendapatkan sumber air bersih dan belum ada akses PDAM yang masuk ke Dusun 3, Kendala lainnya untuk fasilitas sumur Bor/Sumur Suntik tidak memungkinkan/Tidak layak karena dusun berada di pesisir/Muara sungai dan tekstur tanahnya rawa airnya asin tidak layak untuk di konsumsi.

Di panca Karsa II di dusun 3 kesulitan mendapatkan air bersih disaat musim kemarau sehingga warga harus melewati jarak yang jauh untuk mendapatkan sumber air bersih. Pemerintah Desa,BPD melakukan berbagai upaya baik melalui kegiatan desa dan daerah untuk mengatasi kendala ini .

Masih Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat rentan marginal untuk memanfaatkan akses Kesehatan dan belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kemudahan akses informasi kesehatan yang ada di Desa.

### 3.2. Tingginya perempuan kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki status sebagai keluarga miskin



Isu ini ada Di 8 Desa dampingan Prgram P3PD Sub Komponen 2B.hal ini juga sesuai dengan hasil baseline sebagian besar 80 % SDM/Tingkat pendidikan PEKKA masih sangat minim rata-rata tingkat pendidikan Tamatan SD bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar.

Perempuan Kepala Keluarga sebagai Tulang Punggung Keluarga melakukan aktifitasnya sebagai Pelaku Usaha Olahan Pangan tetapi belum memiliki legalitas perijinan, dan juga sangat membutuhkan akses pendampingan dari pemerintah Desa/Daerah/Stakeholder terkait untuk mengembangkan usahanya .

Perempuan Kepala Keluarga dalam mengembangkan usahanya melalui lembaga keuangan lembaga keuangan swasta sehingga hal ini tidaklah menjadi solusi tetapi menjadi beban dalam melakukan pembayaran cicilan/angsuran, dan hal ini menjadi permasalahan dalam mengembangkan

usaha atau meningkatkan pendapatan sehingga ini menjadi lingkaran setan kemiskinan di Desa yang dialami oleh kelompok rentan marginal.

### 3.2. Minimnya Pengetahuan kelompok Rentan Marginal dalam Pengelolaan keuangan keluarga



Kondisi yang ada di desa dampingan UMKM kelompok Perempuan dan rentan marginal tidak melakukan pencatatan keuangan dalam mengelola usaha baik usaha olahan pangan, usaha dagang/kios maupun usaha penunjang lainnya. Lemahnya dalam hal pembukuan sederhana sehingga pemasukan/pendapatan dan pengeluaran tidak terkontrol dan keuangan usaha bercampur dengan keuangan kebutuhan keseharian, sehingga hal ini juga yang menjadi salah satu mandeknya usaha kelompok PEKKA dan kelompok usaha masyarakat di desa.

3.4 Kondisi di 8 Desa Dampingan Pemasaran usaha UMKM kelompok perempuan dan Kelompok rentan marginal pemasarannya masih diseputaran desa karena terkendala legalitas perijinan, label halal, BPOM dan Kemasan yang belum bisa bersaing dengan kelompok usaha lainnya, belum ada pendampingan yang maksimal kepada kelompok usaha utamanya kelompok rentan marginal



3.5 Masih Rendahnya Partisipasi Aktif Kelompok Rentan/Marginal dalam Penyampaian Kebutuhan prioritas baik untuk kegiatan penguatan kapasitas maupun pendampingan usaha dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab tidak adanya perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Perencanaan penganggaran Desa

3.6. Masyarakat masih kurang dalam penguasaan public speaking sehingga belum maksimal dalam menyampaikan aspirasi dalam kegiatan musyawarah Desa. Kondisi ini merata disemua desa pilot dampingan Program.

3.7. Lokasi desa yang jauh dari ibukota kabupaten dan sulit diakses karena tidak memiliki kendaraan transportasi publik yang beroperasi secara reguler.

3.8. Masih Minimnya Sosialisasi/ Peran Stakeholder terkait Program Perlindungan Sosial ke tingkat Desa/Dusun/Masyarakat sehingga akses informasi kemudahan untuk mendapatkan fasilitas program tidak sampai kepada masyarakat Rentan.

3.9. Belum Akuratnya Validasi Data dari Tingkat Pusat sampai tingkat Desa Hal ini juga menjadi permasalahan dalam prioritas program untuk kelompok rentan marginal.

3.10 Masyarakat miskin masih sulit keluar dari jerat kemiskinsn karena terbatasnya akses terhadap Modal, pelatihan/keterampilan, atau lapangan pekerjaan yang memadai, sebagian besar kondisi desa dampingan memiliki permasalahan dan tantangan yang sama terkait modal, pelatihan untuk menunjang kegiatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan usaha, sebagian besar pelatihan yang dilakukan oleh desa maupun OPD belum memiliki Komitmen yang strategis untuk keberlanjutan.

#### **4. Kegiatan Pendampingan Desa Inklusif**

Fokus pendampingan yang dilakukan melalui Program P3PD menysasar pada 2 aspek, yaitu inklusi sosial dan akuntabilitas sosial. Upaya yang dilakukan dalam mendorong inklusi sosial dan akuntabilitas sosial menggunakan skema sekolah lapang sebagai instrumen peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan pada seluruh pemangku kepentingan di desa, khususnya kelompok rentan dan marjinal. Pendekatan lainnya yang dilakukan adalah membangun komunikasi dan dialog dengan institusi pemerintahan desa (pemerintah desa dan BPDDes), serta representasi kelompok masyarakat dalam mendorong kebijakan, program, serta penganggaran desa yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan marjinal.

Kegiatan peningkatan kapasitas yang diusulkan dalam sekolah lapang didasarkan pada situasi dan kondisi desa (baseline data), usulan masyarakat dan pemerintah desa, serta observasi tim pendamping P3PD. Berikut ini adalah usulan kegiatan sekolah lapang pada lokasi dampingan.

**Tabel 3.**  
**MATERI SEKOLAH LAPANG**

NO	Desa Lama/Desa Baru ( 8 Desa )	Materi
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orientasi kader inklusi dan akuntabilitas Sosial</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas UMKM Kelompok Rentan Marginal</li> <li>3. Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan kepada Kelompok Pemuda/Forum Pemuda</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Kepada Kelomppok Rentan dan Marginal tentang Proses Musyawarah Desa</li> <li>5. Pemasaran Digital melalui Media Sosial bagi Pelaku Usaha/UMKM Kelompok Rentan/Marginal</li> <li>6. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Budidaya tanaman Sayuran/Hortikultura kepada Kelompok Rentan Marginal</li> <li>7. Peningkatan Kapasitas tentang Perencanaan dan Analisa Usaha kepada UMKM Kelompok Rentan Marginal</li> <li>8. SL Model Penggalan Gagasan, Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kelompok Rentan Marginal</li> <li>9. Peningkatan kapasitas kepada Kelompok Rentan Margina dan petani milineal tentang sistem pertanian Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan</li> <li>10. Peningkatan Pendapatan kelompok rentan Marginal melalui Pelatihan pembuatan Minyak Kelapa dan VCO</li> <li>11. Penggunaan Sosial Media sebagai sarana penyampaian informasi kepada warga Desa</li> <li>12. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kube Kelompok Perempuan dalam Pengolahan Pangan Berbahan Dasar Ikan)</li> <li>13. Pelatihan Pelestarian Adat Budaya/Revitalisasi Kearifan Lokal kepada Kelompok Rentan Marginal</li> <li>14.14. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik bagi Kelompok PEKKA dan kelompok Rentan Marginal</li> <li>15. Pelatihan Pembuatan Pakan Ayam dan strategi membangun jaringan Pasar</li> <li>16. Keterampilan Pengolahan Keripik Pisang dan Kacang Mente bagi Kelompok Rentan Marginal</li> </ol>

## 5. Realisasi

### a. Desa Dampingan 2023 - 2024

5.1. Program Sekolah Lapang di Kabupaten Pohuwato menandai penting dalam inklusivitas dan akuntabilitas sosial di desa, dengan total partisipan 1.922 Orang dengan dominasi 1.276 perempuan dan 646 laki-laki, menunjukkan komitmen kuat terhadap pengurangan kesenjangan gender dan peningkatan kapasitas Perempuan dan kelompok rentan lainnya. Keterlibatan kelompok rentan dan marginal yang ada di desa menggambarkan upaya program untuk mewujudkan inklusi sosial.

5.2. Pendamping P3PD dan Kader desa memiliki fokus program pada pengembangan keterampilan praktis dan pemberdayaan kelompok perempuan, pemuda, anak-anak, kelompok rentan dan marginal, dengan 65 % peserta perempuan, 35 % lansia menargetkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan kelompok yang menghadapi hambatan historis dalam pendidikan, penyampaian aspirasi dan peluang ekonomi. Dan lebih dari 40% peserta Sekolah Lapang ikut hadir dan aktif dalam kegiatan dan musyawarah-musyawarah desa.

1.3. Keberhasilan Program Sekolah Lapang dibuktikan dengan tersusunnya laporan pada 4 desa dan didukung dengan Dokumentasi berupa foto, laporan keuangan, dan bukti tambahan tentang keberlangsungan dan dampak program.

Empat lokus desa lama dan lokus desa baru di tahun 2024, dalam keberlanjutan kegiatan inklusi dan akuntabilitas di desa akan didampingi oleh kader desa yang telah ditunjuk langsung dan di berikan SK oleh kepala desa.



Tindaklanjut kegiatan Sekolah lapang Kolaborasi Program Dinas Perindagkop dengan Pemerintah desa Melalui bantuan mesinjahit kepada pelaku usaha kelompok perempuan

## **b. Desa Dampingan 2024**

5.1. Program Sekolah Lapang di Kabupaten Pohuwato menandai penting dalam inklusivitas dan akuntabilitas sosial di desa, dengan total partisipan 1161 Orang dengan dominasi 731 perempuan dan 430 laki-laki, menunjukkan komitmen kuat terhadap pengurangan kesenjangan gender dan peningkatan kapasitas Perempuan dan kelompok rentan lainnya. Keterlibatan kelompok rentan dan marginal yang ada di desa menggambarkan upaya program untuk mewujudkan inklusi sosial.

5.2. Pendamping P3PD dan Kader desa memiliki fokus program pada pengembangan keterampilan praktis dan pemberdayaan kelompok perempuan, pemuda, anak-anak, kelompok rentan dan marginal, dengan 70 % peserta perempuan 30 % lansia menargetkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan kelompok yang menghadapi hambatan historis dalam pendidikan, penyampaian aspirasi dan peluang ekonomi. Dan lebih dari 50 % peserta Sekolah Lapang ikut hadir dan aktif dalam kegiatan dan musyawarah-musyawarah desa.



## **6. Observasi**

6.1. Tingkat partisipasi Masyarakat dalam kegiatan desa.

Sebelum dilaksanakannya intervensi Program P3PD Sub Komponen 2B di delapan desa lokus, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan desa tergolong rendah. Data baseline yang diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan responden menunjukkan bahwa masyarakat cenderung pasif, dengan kehadiran pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) hanya mencapai 30-40% dari total undangan. Partisipasi lebih tinggi hanya terlihat pada kegiatan tertentu, seperti penyerahan bantuan atau pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini mencerminkan pola partisipasi berbasis manfaat langsung yang sementara dan tidak berkelanjutan.

Namun, situasi ini mulai berubah setelah intervensi pendampingan dilakukan. Program berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marjinal. Dalam MUSRENBANGDES, jumlah peserta yang hadir meningkat secara signifikan, diiringi dengan keaktifan mereka dalam menyampaikan aspirasi. Perubahan ini sebagian besar berkat peran strategis kader inklusi, yang secara aktif memberikan informasi kepada kelompok rentan, mendorong mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di desa.

Dampak positif ini juga terlihat dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024, yang mencerminkan prioritas terhadap kebutuhan kelompok rentan/marjinal. Hal ini menunjukkan bahwa suara kelompok rentan tidak hanya didengar tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan konkret desa.

Selain itu, pendekatan melalui kegiatan tematik Sekolah Lapang (SL) telah memberikan dampak signifikan. Dengan menyesuaikan materi pelatihan sesuai kebutuhan kelompok rentan, program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka tetapi juga membuka akses terhadap informasi dan peluang pendampingan lebih lanjut, baik melalui program daerah maupun inisiatif lainnya.

Meningkatnya partisipasi kelompok rentan ini menjadi bukti nyata kontribusi mereka dalam proses pembangunan desa yang lebih inklusif dan akuntabel. Partisipasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif, yang pada akhirnya menjadi landasan bagi keberhasilan pembangunan desa jangka panjang.

Pendekatan ini menegaskan pentingnya strategi yang mengutamakan inklusi untuk mewujudkan desa yang lebih berdaya dan berkelanjutan, di mana setiap individu, tanpa terkecuali, dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan.

## 6.2. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan

Sebelum pelaksanaan Program P3PD Sub Komponen 2B, keterlibatan pemangku kepentingan sangat rendah. Hasil wawancara dan sosialisasi data baseline yang melibatkan kader inklusi, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BUMDes, serta tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, pendidikan, dan agama menunjukkan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan bersikap pasif. Mereka cenderung menunggu informasi dari bawah dan kurang proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan atau kendala masyarakat, terutama kelompok rentan. Pemerintah desa, BPD, dan lembaga lainnya juga belum maksimal dalam menampung aspirasi

kelompok rentan, menjadikan partisipasi yang rendah ini sebagai kondisi umum di banyak desa dampingan.

Namun, melalui strategi pendampingan yang terstruktur dan pelaksanaan Sekolah Lapang (SL), keterlibatan pemangku kepentingan mulai menunjukkan perubahan signifikan. Proses kegiatan SL melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan, dengan materi tematik yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat. Di akhir sesi, masyarakat bersama pemerintah desa menyusun rencana tindak lanjut yang jelas, termasuk pembagian peran (“Siapa Melakukan Apa”). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat komitmen pemangku kepentingan tetapi juga menciptakan strategi keberlanjutan yang konkret bagi program di desa, khususnya dalam mendukung kelompok rentan. Keterlibatan stakeholder daerah terlihat nyata melalui kolaborasi program antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Perindagkop UMKM) dengan pemerintah desa. Di desa-desa pilot, kolaborasi ini berfokus pada pendampingan UMKM perempuan, termasuk fasilitasi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, label halal, dan pengemasan produk. Program ini telah merealisasikan bantuan seperti mesin jahit pada 2023 dan merencanakan pendampingan bahan produk kue untuk olahan pangan pada 2025 di delapan desa dampingan.

Selain itu, pemerintah desa, BPD, dan kader inklusi memainkan peran kunci dalam mendorong regulasi desa inklusi. Regulasi ini menjadi instrumen strategis untuk keberlanjutan program melalui alokasi Dana Desa yang mendukung kebutuhan kelompok rentan dan marjinal. Penyusunan regulasi dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa, dengan fasilitasi BPD dan pemerintah desa.

Keterlibatan aktif berbagai pihak ini merupakan indikator keberhasilan pendekatan program P3PD dalam mengintegrasikan semua pemangku kepentingan ke dalam proses pembangunan. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan regulasi desa yang inklusif, program ini tidak hanya memberikan dampak langsung tetapi juga memastikan keberlanjutan pasca intervensi. Transformasi ini menegaskan bahwa pendekatan inklusif dan partisipatif adalah kunci untuk mencapai pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan.



*Keterlibatan OPD: Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop, TAP3MD, Lembaga GEKRAF (Gerakan Ekonomi Kreatif), Asosiasi UMKM, Asosiasi KWT) terlibat aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan di desa Pilot dan menyusun rencana Tindak lanjut pasca kegiatan Sekolah Lapang*



### 6.3. Respon audiens terhadap aktivitas yang dilakukan.

Pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) di delapan desa dampingan mendapatkan respons yang signifikan dari audiens, baik sebelum maupun setelah kegiatan. Respon ini mencerminkan perubahan pemahaman, keterlibatan, dan kesadaran peserta terhadap materi dan tujuan program. Berikut adalah poin-poin spesifik yang mencerminkan respon tersebut:

#### 1. Peningkatan Pemahaman dan Partisipasi Aktif Peserta

Sebelum pelaksanaan SL, tingkat pemahaman peserta terhadap materi tematik cenderung rendah, yang tergambar dari hasil post-test awal. Namun, setelah mengikuti kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam penguasaan materi. Tidak hanya itu, partisipasi aktif peserta dalam proses pelaksanaan SL, seperti memberikan informasi dan umpan balik selama sesi tematik, juga meningkat secara substansial. Hal ini menegaskan efektivitas metode pembelajaran partisipatif yang diterapkan dalam SL.

#### 2. Komitmen terhadap Tindak Lanjut Kegiatan

Pada sesi akhir SL, peserta bersama pemerintah desa (Pemdes) dan pendamping desa menyusun rencana tindak lanjut (RTL) sebagai hasil nyata dari proses pembelajaran. Setiap pihak, termasuk kelompok rentan, mengambil peran spesifik dalam rencana tersebut, menciptakan struktur kolaboratif yang memastikan keberlanjutan program. Strategi ini memungkinkan kegiatan pasca-SL tetap berjalan meskipun pendampingan program resmi telah berakhir.

#### 3. Kesadaran yang Meningkat terhadap Tujuan Program

Sebelum SL dilaksanakan, peserta umumnya memiliki kesadaran yang rendah terhadap tujuan dan manfaat program. Banyak dari mereka yang belum memahami bagaimana SL berdampak pada pengembangan kapasitas individu dan pembangunan desa. Namun, melalui proses

pembelajaran yang sistematis, termasuk sesi diskusi dan praktik langsung, peserta mulai memahami nilai strategis SL dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

#### 4. Respon Positif terhadap Metode Praktik Langsung

Sesi praktik langsung merupakan bagian integral dari metode SL berhasil memicu respon positif dari peserta. Selama sesi ini, peserta tidak hanya berinteraksi secara aktif tetapi juga menunjukkan peningkatan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menerapkan konsep yang dipelajari ke dalam konteks nyata di desa mereka.

Respon audiens ini menegaskan bahwa Sekolah Lapang tidak hanya menjadi forum pembelajaran, tetapi juga alat menciptakan perubahan perilaku dan membangun komitmen jangka panjang. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis praktik, SL mampu menciptakan dampak melampaui program, memungkinkan desa mengoptimalkan potensi mereka dan memastikan keberlanjutan pembangunan partisipatif.

#### 6.4. Perubahan yang Nampak dari hasil intervensi program.

##### 1. Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan

- Keterlibatan kelompok rentan dan marjinal dalam kegiatan desa meningkat secara signifikan, terlihat dari partisipasi aktif dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta kegiatan Sekolah Lapang.
- Pemerintah desa lebih memprioritaskan usulan kebutuhan kelompok rentan/marjinal dalam perencanaan pembangunan desa.

##### 2. Penguatan Kelompok UMKM

- Terbentuknya kelompok UMKM dengan legalitas Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, seperti kelompok pembuat keripik, olahan kacang mente, abon ikan, dan kelompok wanita tani.
- Kelompok UMKM ini menjadi prioritas pendampingan dalam program desa, daerah, atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Kolaborasi aktif dengan Dinas Perindagkop UMKM dan Gerakan Ekonomi Kreatif (GEKRAF) Kabupaten Pohuwato dalam mendukung pengembangan usaha.

##### 3. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan

- Peran aktif Dinas Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan dalam mendampingi kelompok tani dan wanita tani untuk mengembangkan praktik pertanian ramah lingkungan.
- Pembentukan Kelompok Tani Milenial dan pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Panca Karsa II.

#### 4. Kebijakan dan Regulasi Desa yang Inklusif

- Adanya Peraturan Desa (Perdes) yang memprioritaskan kelompok rentan, seperti perempuan, PEKKA, lansia produktif, dan penyandang disabilitas.



Penyerahan Draft PERDES Desa Inklusif Kepada BPD dan Pemdes untuk ditindaklanjuti dibahas dalam musyawarah desa

- Pembangunan sarana fisik yang inklusif untuk mendukung partisipasi kaum difabel dalam pembangunan desa.
- Alokasi dana desa untuk pemberdayaan kelompok rentan/marginal.



Penggunaan Dana Desa memprioritaskan kebutuhan kelompok rentan marginal baik terkait peningkatan kapasitas maupun penguatan modal

#### 5. Keterlibatan Pemuda dan Pelestarian Budaya Lokal

- Keterlibatan aktif kelompok pemuda dalam kegiatan seni, budaya, dan pengembangan ekonomi desa yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Pelestarian kearifan lokal "HUYULA" (gotong royong) sebagai budaya khas Gorontalo, yang dihidupkan kembali melalui kegiatan Sekolah Lapang di Desa Mootilango.

#### 6. Penguatan Kader dan Stakeholder Desa

- Terbentuknya kader inklusi yang aktif mendampingi kelompok rentan dan menyampaikan aspirasi mereka dalam musyawarah desa.
- Keterlibatan stakeholder, seperti asosiasi UMKM, Dinas/OPD, dan praktisi lokal, dalam mendukung keberlanjutan program di desa-desa dampingan.

## 7. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Desa

- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang responsif gender dan inklusif.
- Kolaborasi program antara dinas dan desa, seperti program GEKRAF untuk UMKM dan program pertanian ramah lingkungan, menjadi strategi baru bagi keberlanjutan pembangunan.

## 8. Akses Informasi dan Pendampingan Kelompok Rentan

- Terbukanya akses informasi program daerah untuk kelompok rentan, memungkinkan mereka lebih aktif mengembangkan ekonomi desa.
- Kelompok rentan kini diakui memiliki peran penting dalam pembangunan desa, yang sebelumnya terabaikan dalam evaluasi pembangunan sebelum program intervensi.

Ringkasan ini menyoroti perubahan konkret dari program yang berdampak pada penguatan inklusi, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.

### 6.5. Terbentuknya Kelompok dari Hasil Sekolah Lapang

1. Di Desa Bumbulan, terbentuk kelompok UMKM Abon Ikan yang kini menjadi salah satu penggerak ekonomi setempat. Kelompok ini berhasil memanfaatkan potensi perikanan desa menciptakan produk olahan bernilai tambah, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota tetapi juga membuka peluang pemasaran lebih luas. Selain itu, keberhasilan program pendampingan juga terlihat dari aktifnya kembali Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Olahan Ikan yang sempat tidak aktif. KUBE ini kini mulai kembali memproduksi berbagai olahan ikan yang diminati pasar lokal.
2. Desa Taluduyunu menunjukkan potensi pengolahan kelapa dengan terbentuknya kelompok pembuat Virgin Coconut Oil (VCO) dan minyak kelapa. Kelompok ini dilatih menghasilkan produk berkualitas yang memiliki nilai pasar tinggi, baik untuk konsumsi lokal maupun tujuan ekspor. Program ini tidak hanya memberdayakan masyarakat tetapi juga mengoptimalkan sumber daya alam lokal yang melimpah.
3. Di Desa Panca Karsa II, terbentuk kelompok wanita tani yang fokus pada pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian berkelanjutan. Selain itu, rencana pembentukan Kelompok Peternak Milenial sedang dalam proses fasilitasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Taluditi dan Dinas Pertanian. Kelompok ini diharapkan menjadi model usaha peternakan modern yang dikelola secara profesional oleh generasi muda desa, memberikan harapan baru bagi pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan peternakan.

4. Desa Popaya menjadi saksi terbentuknya kelompok UMKM Keripik Pisang dan kelompok UMKM Olahan Kacang Mente. Produk-produk ini dirancang untuk mengoptimalkan hasil pertanian lokal dan menciptakan produk olahan yang memiliki daya saing di pasar. Kelompok-kelompok ini juga mendapat pendampingan dalam pengemasan, pemasaran, dan sertifikasi produk, sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.



**KWT Panca Karsa II**



**Kelompok Usaha Penjual Ikan dan Pebuat abon**

6.6. Potensi Dampak Jangka Panjang dari Sekolah Lapang, yaitu;

Model pelaksanaan Sekolah Lapang telah membuktikan diri sebagai metode praktis dan efektif mendampingi pemberdayaan masyarakat desa. Program ini memberikan dampak positif dalam berbagai aspek pembangunan desa, dengan potensi jangka panjang sebagai berikut:

1. Metode Praktis untuk Pemberdayaan Desa: Sekolah Lapang menjadi salah satu pendekatan yang mudah diterapkan memberdayakan masyarakat desa. Dengan metode partisipatif, kegiatan ini tidak hanya mengedukasi tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pembangunan.
2. Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan Desa: Pelaksanaan Sekolah Lapang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pembangunan desa. Aspirasi masyarakat kini lebih terakomodasi melalui musyawarah desa, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang inklusif. Pembangunan desa kini dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, menciptakan rasa kepemilikan lebih kuat.
3. Mendorong Desa Maju dan Mandiri: Dengan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan, peluang desa untuk tumbuh, maju, dan mandiri semakin besar. Partisipasi kolektif ini menjadi fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan pembangunan desa.
4. Pemberdayaan Potensi Lokal melalui Kelompok UMKM: Sekolah Lapang mendorong terbentuknya kelompok UMKM yang fokus pada pengelolaan potensi unggulan desa. Kelompok-kelompok ini menghasilkan produk-produk unggulan desa yang berdaya saing, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
5. Kader Penggerak Ekonomi Desa: Kader-kader Sekolah Lapang kini menjadi motor penggerak ekonomi desa. Mereka tidak hanya mendampingi masyarakat tetapi juga menginspirasi inovasi dalam pengembangan potensi lokal, menjadikan desa lebih dinamis dan adaptif terhadap peluang baru.
6. Meningkatkan Kolaborasi dan Akses Informasi: Model Sekolah Lapang membuka akses informasi dan pendampingan program bagi masyarakat desa. Melibatkan berbagai stakeholder, seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, dunia usaha, swasta, perguruan tinggi, dan NGO, kegiatan membuka peluang kolaborasi memperkuat pembangunan desa.
7. Strategi Kolaborasi Multi-Stakeholder: Sekolah Lapang telah menjadi platform strategis untuk mengintegrasikan program antara pemerintah desa, pemerintah daerah, sektor swasta, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan NGO. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang memperluas dampak dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.
8. Keberlanjutan melalui Regulasi Desa Inklusi: Salah satu tindak lanjut utama dari Sekolah Lapang adalah penyusunan Regulasi Desa Inklusi. Peraturan desa ini menjadi landasan hukum untuk memastikan keberlanjutan program, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan dan mendorong pembangunan desa yang inklusif.

Dengan semua potensi ini, Sekolah Lapang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan mandiri. Program ini menunjukkan dengan strategi yang tepat, desa dapat menjadi pusat inovasi dan pemberdayaan yang memberdayakan semua lapisan masyarakat.

## **7. Pelajaran yang Dipetik (Lesson Learned)**

Dari 8 Desa dampingan Program sebagian besar kader sudah melakukan peran dan tupoksinya sebagai penggerak Sekolah lapang dari Tahapan persiapan Pelaksanaan dan Pasca Sekolah Lapang.

Strategi yang sudah dilakukan oleh Kader Inklusi : Mengidentifikasi data Kelompok rentan marginal, kebutuhan kelompok rentan marginal, Melakukan pendampingan kepada kelompok rentan marginal terutama dalam mengakses layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah Desa maupun penguatan kapasitas melalui Sekolah lapang, meningkatkan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat rentan pada musyawarah desa/Forum pengambilan keputusan di Desa, Menggerakkan serta mensinergikan Pelaksanaan sekolah lapang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong kebijakan program pemerintah Desa, Membantu pemerintah Desa dalam mencapai Target SDGs Desa khususnya dalam pencapaian desa Inklusif.

### **Pelaksanaan Sekolah Lapang di 8 Desa Pilot:**

1. Efektivitas Pelaksanaan : Kegiatan Sekolah Lapang dilakukan sesuai dengan Perencanaan Kegiatan Awal (Tor Kegiatan) dan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan dirancang sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan marginal dari hasil Baseline data
2. Metode yang Interaktif dan pendekatan partisipatif : diskusi, simulasi, praktek mendorong peserta lebih aktif dan penyampaian materi Sekolah lapang sangat sesuai dengan kebutuhan Peserta, mudah dipahami
3. Narasumber yang terlibat disesuaikan dengan tematik Sekolah lapang dan diakhir sesi sekolah lapang dilakukan RKTIL Tindak lanjut kegiatan dan sebagian besar Narasumber mengambil peran dalam kegiatan tindak lanjut yang disusun bersama peserta, Kader, Pemerintah Desa. Adanya keberlanjutan pasca Sekolah lapang
4. Pelaksanaan Sekolah lapang membuka akses informasi kepada kelompok rentan marginal terkait kemudahan untuk mengakses layanan dasar, kemudahan dalam mengakses program di tingkat kabupaten melalui OPD.
5. Lokasi Kegiatan mudah diakses oleh peserta dan tempat yang memberikan kenyamanan dalam mengikuti kegiatan

## **8. Tindak Lanjut (*Follow-Up Action*)**

Langkah konkret yang harus dilakukan setelah kegiatan selesai, seperti:

Penguatan jaringan kerja dengan peserta atau pihak terkait.

Menghubungkan peserta dengan Instansi/Dinas dan Lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan kelompok Rentan marginal, diantaranya yaitu Dinas Perindagkop Kabupaten Pohuwato untuk keberlanjutan Pendampingan Modal kepada UMKM Kelompok Rentan Marginal serta Pengurusan Legalitas Usaha (PIRT, NIB, Halal) dan Lembaga Gekraf (Gerakan Ekonomi Kreatif) untuk pengembangan Usaha UMKM Kelompok rentan marginal dengan menggabungkan keahlian dibidang teknologi informasi dengan kreatifitas dalam menghasilkan produk UMKM, serta membuka peluang bagi kelompok rentan marginal berkomunikasi dengan pihak/lembaga terkait sesuai kebutuhan.

Kolaborasi dengan Pemerintah Desa melalui dana desa, Kader Desa Inklusif memastikan setiap kebutuhan kelompok rentan marginal dapat diprioritaskan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Menindaklanjuti Kegiatan Pasca Sekolah lapang dengan Narasumber yang terlibat dalam Proses Kegiatan : Dinas Pertanian Kab Pohuwato, BPP Taluditi, BPP Dengilo Terkait Pendampingan Kepada Kelompok Perempuan/Kelompok Wanita Tani dalam hal Budidaya tanaman sayuran sebagai kegiatan yang bias menunjang ketahanan Pangan Keluarga.

Menindaklanjuti Kegiatan dengan Lembaga Gekraf Pohuwato, Lembaga Burung Indonesia dan Yayasan Bina Tani Mandiri terkait Tindaklanjuti dan Strategi kolaborasi program Dengan Desa.

Memberikan Penguatan Kepada Kader Inklusi untuk berkoordinasi, haring Informasi dengan OPD Daerah dan Lembaga yang berpeluang menjadi mitra Kader Inklusi dan Pemerintah Desa dalam mendorong Desa yang Inklusif Dan Akuntabel.

Koordinasi dengan Dinas PMD dan TA P3MD terkait strategi keberlanjutan Program dan Memperluas Desa Replikasi merekomendasikan 8 Desa Pilot sebagai Desa percontohan dan kader Inklusi di 8 desa sebagai penggerak baik untuk desa Pilot maupun desa lainnya yang berpeluang untuk desa Replikasi Rekomendasi peningkatan efektivitas kegiatan berikutnya melalui sumber yang relevan.

Setelah terlaksananya rangkaian tahapan pendampingan program dan Sekolah lapang, Rekomendasi kegiatan lanjutan melalui Sumber pendanaan Dana Desa dan sumber pendanaan Lainnya. Beberapa desa

di tahun 2024 sudah berkomitmen dan melakukan kegiatan-kegiatan hasil rekomendasi di tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlaksana dan dilanjutkan dengan penganggaran melalui APBDes 2025 untuk mensupor kegiatan yang di butuhkan kelompok rentan marginal.

Melalui program Perindag 8 Desa pilot sebagai Rekomendasi desa Prioritas untuk mendapatkan pendampingan bagi UMKM Perempuan dalam hal Permodalan dan bentuk bahan pembuatan KUE dan Peralatan pendukung Melalui Dinas Pertanian dan Dinas Pangan akan melakukan support dan pendampingan khusus untuk kegiatan yang berkaitan dengan budidaya tanaman sayuran.

Rencana Evaluasi Dampak dari Kegiatan Sekolah Lapang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/OPD : Dinas PMD , Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan stakeholder lainnya yang memiliki tupoksi dalam program Kegiatan yang sudah terlaksana.

## 9. Sasaran Dan Pencapaian Program

### 9.1 Sasaran

Pelaksanaan program P3PD di desa tidak hanya pada kelompok rentan dan marjinal, akan tetapi juga seluruh pemangku kepentingan yang memiliki relasi ataupun berpotensi menjadi mitra untuk mendorong inklusi dan akuntabilitas sosial di desa. Berikut ini adalah pemangku kepentingan/aktor yang dilibatkan dalam kegiatan pendampingan.

**Tabel 3**  
**PETA AKTOR DI DESA**

No	Nama Kelompok Rentan/marjinal	Nama Pemangku Kepentingan Strategis
1	Penyandang Disabilitas	Pemerintah Desa, Dinas Sosial, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)
2	Perempuan Kepala Keluarga	Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab.Pohuwato, Dinas Perindagkop Kab.Pohuwato, Asosiasi UMKM Pohuwato, GEKRAF
3	Masyarakat Miskin	Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, , Dinas Perindagkop Kab.Pohuwato, Dinas PMD,Dinas Kesehatan/Puskesmas,Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan

No	Nama Kelompok Rentan/marjinal	Nama Pemangku Kepentingan Strategis
4	Lanjut Usia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan/Puskesmas
5	Anak Yatim Piatu	Dinas Sosial, Pemeintah Desa, Baznas Pohuwato
6	Remaja Rentan	Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, , Dinas Perindagkop Kab.Pohuwato,
7	Pelaku Usaha Kecil	Lembaga Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf), Lembaga PT. Rilis Platform Indonesia, Pelaku Usaha dalam Pengelolaan BUMDes Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindagkop Kab.Pohuwato.

## 9.1 Pencapaian Program

Capaian selama proses pendampingan pada tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

### 9.2.1 Kader Desa Inklusif & Penggerak Sekolah Lapang

Selama proses pendampingan, masing-masing desa telah membentuk dan menetapkan 5 orang kader sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan maupun mengawal proses inklusi dan akuntabilitas sosial di desa. Total kader laki-laki sebanyak 16 orang dan kader perempuan sejumlah 24 orang.

### 9.2.2 Kebijakan/Regulasi

Setidaknya terdapat 1 desa ( Desa Panca Karsa II ) yang telah membentuk peraturan desa terkait inklusi dan Akuntablitas Sosial. Sedangkan 3 desa lainnya masih berproses dalam penyusunan regulasi yang terkait dengan desa inklusif. Meskipun demikian, seluruh desa telah berkomitmen dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan dan marjinal. Misalnya dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dimana perwakilan kelompok rentan dan marjinal diberikan kesempatan untuk hadir dan menyuarakan aspirasinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

### 9.2.3 Program

Pemerintah desa yang didampingi sebagian besar sudah memiliki program yang secara khusus menasar kelompok rentan dan marjinal di desa. Meskipun Program nya belum merata di semua Desa Dampingan. Secara Umum pemerintah desa tetap memperhatikan kepentingan kelompok rentan dan marjinal melalui program-program reguler. Misalnya dalam program perlindungan sosial, kelompok rentan dan marjinal mendapatkan prioritas sebagai penerima bantuan program.

### 9.2.4 Penganggaran

Pemerintah desa juga berkomitmen dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam sekolah lapang. Setidaknya ada 7 desa yang telah memasukkan penganggaran yang mendukung keberlanjutan kegiatan sekolah lapang pada APBDes Tahun 2025. Misalnya kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan usaha ekonomi yang telah dirintis oleh kelompok perempuan kepala keluarga yang memanfaatkan peralatan pengolahan makanan. Jumlah alokasi anggaran yang menjadi komitmen pemerintah desa sebesar Rp 5000.000 s.d. 10 Juta Rupiah Perdesa

### 9.2.4 Pengorganisasian Masyarakat

Salah satu aspek kunci keberhasilan program pendampingan di delapan desa Kabupaten Pohuwato adalah pengorganisasian masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Tim pendamping telah berhasil membentuk berbagai kelompok usaha yang tidak hanya fokus pada pemberdayaan perempuan dan pemuda, tetapi juga mendorong pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Berikut adalah hasil pengorganisasian masyarakat yang telah dicapai di beberapa desa:

#### ***Desa Panca Karsa II***

1. **UMKM Kelompok Perempuan Rentan:** Kelompok ini beranggotakan perempuan kepala keluarga yang fokus pada pengelolaan pangan desa. Mereka dilatih untuk mengembangkan produk lokal dan memperluas pasar.
2. **Kelompok Pemuda Peternak Unggas:** Kelompok ini terdiri dari pemuda desa yang memiliki minat dan keterampilan dalam peternakan unggas. Aktivitas mereka mencakup manajemen peternakan hingga pemasaran produk.
3. **Tindak Lanjut Sekolah Lapang (Dalam Proses Pembentukan):**
  - **Kelompok Wanita Tani:** Kelompok ini diharapkan menjadi pionir dalam inovasi pertanian lokal berbasis keluarga.

- Kelompok Petani Milenial: Dirancang untuk melibatkan generasi muda dalam modernisasi praktik pertanian melalui teknologi dan pendekatan yang inovatif.

### **Desa Taluduyunu**

UMKM Pembuat Minyak Kelapa dan VCO: Kelompok ini fokus pada pengolahan minyak kelapa dan produk VCO (Virgin Coconut Oil) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Mereka juga mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar lokal dan regional.

### **Desa Bumbulan**

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Olahan Pangan: Tim pendamping berhasil mengaktifkan kembali KUBE yang sebelumnya sempat vakum. Kelompok ini mengolah bahan dasar ikan menjadi produk bernilai tambah, seperti kerupuk ikan, nugget, dan abon ikan.

### **Desa Sipayo**

UMKM Olahan Pangan: Kelompok ini mengelola bahan pangan lokal menjadi berbagai produk inovatif yang bernilai jual tinggi. Fokus mereka adalah meningkatkan kualitas produksi dan memperluas akses pasar.

### **Desa Popaya**

- UMKM Kelompok Pembuat Keripik Pisang Varian Rasa: Kelompok ini menciptakan keripik pisang dengan berbagai varian rasa sebagai produk khas desa. Kreativitas ini membantu meningkatkan daya tarik produk di pasar.
- UMKM Olahan Kacang Mete: Kelompok ini memanfaatkan hasil panen kacang mete untuk diolah menjadi produk makanan yang memiliki nilai tambah, seperti kacang mete panggang dengan berbagai rasa.

## **10. Manfaat Pendampingan**

Manfaat pendampingan terbagi atas dua bagian yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.

### *10.1 Manfaat Langsung*

Manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marjinal di Delapan Desa dampingan berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam Peningkatan Ekonomi

- Pelatihan Pemasaran Online hasil UMKM kelompok rentan di 8 Desa 7 Desa dampingan, dengan pengetahuan ini UMKM Kelompok perempuan sebagian besar sudah memasarkan hasil produk baik olahan pangan, hasil pertanian dan usaha lainnya sudah mengenal dan memasarkan lewat Media social, manfaatnya jaringan pemasaran semakin meluas yang awalnya hanya disepertikan desa dengan adanya pelatihan ini pemasaran sudah meluas ke wilayah kecamatan/Desa-desa Tetangga
- Pelatihan public speaking dan metode penggalian gagasan dan penyampaian Aspirasi dilaksanakan di 7 Desa dampingan, manfaatnya masyarakat rentan diberikan keterampilan tehnik berbicara depan umum menyampaikan Gagasan dan melakukan simulasi proses musyawarah desa sehingga hal ini menjadi pelajaran baru dan sangat bermanfaat untuk membangun kepercayaan diri peserta dan bisa menyampaikan aspirasi di musyawarah Desa
- Pelatihan Keterampilan pembuatan Keripik Pisang, Olahan Kacang Mente, Pembuatan Kue dan keterampilan lainnya di 6 Desa dampingan. Kegiatan ini menjadi peluang usaha bagi kelompok perempuan dalam memanfaatkan potensi Desa dibidang pertanian/Komoditas , dan bisa menambah penghasilan Keluarga. Dari hasil kegiatan ini bisa menambah pendapatan masyarakat rentan yang awalnya hanya menjual pisang dan juga kacang mente dalam bentuk bahan mentah dengan harga jual sekitar 15 000.- 20.000 setelah mengikuti pelatihan ada nilai tambah sekitar 50 -60 % atau sekitar Rp 40.000 – 50.000 setiap kali produksi
- Penguatan kapasitas terkait Pengeolaan keuangan Keluarga bagi kelompok Perempuan Kepala Keluarga di Desa Bumbulan, bermanfaat bagi PEKKA dalam mengatur keuangan usaha dan keuangan keluarga sehingga bisa dihitung keuntungan yang didapat dalam melakukan usaha
- Penguatan kapasitas UMKM di Desa Panca Karsa II, dengan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM, Manfaatnya masyarakat rentan mendapatkan akses informasi dan kemudahan dalam pendampingan program daerah, dan mendapatkan bantuan mesin jahit untuk mengembangkan usaha konvensi yang ada di panca Karsa II dan hal ini manfaatnya berdampak pada peningkatan kualitas produksi usaha Konvensi dan pendapatan masyarakat rentan
- Penguatan kapasitas terkait pertanian sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
- Penguatan kapasitas terkait Analisa Usaha dan penyusunan Bisnis Plan Bermanfaat dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan dan sebagai dokumen perencanaan usaha sebagai

Dokumen yang bisa di sampaikan kepada emerintah Desa dan OPD yang akan mendampingi dan mengembangkan usaha atau yang akan bermitra dengan UMKM

- Kegiatan yang sudah terlaksana di 8 Desa pilot manfaatnya sangat berdampak pada Meningkatnya kemandirian masyarakat dan meningkatnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan musyawarah Desa



### 10.1 Manfaat Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung yang didapatkan dari proses pendampingan adalah:

1. Kelompok Rentan menjadi mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada bantuan dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Peran Stakeholder memprioritaskan kegiatan kelompok rentan marginal
3. Adanya keterlibatan dan peran aktif dari pemerintah Desa Untuk program kelompok Rentan Marginal
4. Menumbuhkan Rasa Kepedulian kepada kelompok rentan Marginal

## 11. Kendala dan Tangtangan Pendamping

Kendala dalam proses pendampingan yang dilakukan selama tahun 2023-2024 dapat dibagi atas dua bagian yaitu, tantangan yang terkait dengan aspek teknis pelaksanaan program dan aspek diluar teknis pelaksanaan program.

### 11.1 Aspek Teknis Pelaksanaan Program

Kendala yang terkait dengan aspek teknis pelaksanaan program meliputi keterbatasan program dalam mendukung kegiatan pendampingan secara luas. Misalnya memberikan dukungan pendanaan untuk pembelian barang dan peralatan yang dibutuhkan oleh kelompok rentan dan marjinal. Selain itu, administrasi pertanggungjawaban program yang sangat banyak mempengaruhi waktu dan kualitas pendampingan yang diberikan pada kelompok rentan dan marjinal.

Hal positif dari tantangan ini adalah adanya proses pembelajaran terkait Administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban program yang bisa di padukan dan kolaborasikan dengan Pelaporan program lainnya

### 11.2 Aspek Non Teknis Pelaksanaan Program

Aspek non teknis pelaksanaan program terkait dengan kesulitan tim pendamping dalam berkomunikasi dengan pemerintah desa. Kepala desa sulit ditemui karena memiliki kegiatan yang cukup padat dengan pemerintah daerah maupun memiliki agenda pribadi diluar desa. Sementara perangkat desa lainnya tidak dapat mengambil keputusan yang diperlukan secara cepat oleh tim pendamping.

## 12. Kesimpulan dan Rekomendasi

### 12.1 Kesimpulan

Program P3PD Sub-Komponen 2B yang dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato, mengintervensi delapan desa (Panca Karsa II, Bumbulan, Taluduyunu, Mootilango, Sipayo, Popaya, Padengo, dan Pohuwato) selama dua tahun (2023-2024), bertujuan mendorong praktik pembangunan desa yang inklusif dan akuntabel. Pendekatan ini dirancang memperkuat peran kader desa dalam mempromosikan inklusi sosial dan akuntabilitas melalui kegiatan strategis seperti Sekolah Lapang. Selain itu, program ini mencakup dorongan regulasi inklusi dan akuntabilitas di tingkat desa maupun kabupaten guna menjamin keberlanjutan setelah pendampingan selesai.

### 1. Keberhasilan dan Implikasi Program

Kegiatan Sekolah Lapang yang dirancang sebagai inti intervensi berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, baik dari segi waktu maupun anggaran. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan program memiliki landasan kuat yang mampu mengelola berbagai tantangan teknis di lapangan. Lebih dari itu, kegiatan ini berhasil membangun kapasitas masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marjinal, dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Program ini juga mencatat pencapaian signifikan dalam membangun kolaborasi antar program di tingkat desa. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperluas cakupan dampak tetapi juga menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dengan menempatkan inklusi sosial sebagai pendekatan utama, program ini mengubah dinamika pembangunan desa dari yang sebelumnya eksklusif menjadi lebih terbuka dan akomodatif terhadap kelompok rentan. Hal ini menjadi langkah penting memastikan pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang adil dan merata.

## **2. Memaksimalkan Peran PMD Provinsi Gorontalo dalam mendukung kebijakan yang memperkuat Desa Inklusi di Desa**

PMD Provinsi sangat Dibutuhkan dalam memainkan perannya untuk mendukung dan memperkuat kebijakan desa Inklusi melalui strategi-strategi baik berkolaborasi dan mengintegrasikan dengan program pemerintah provinsi maupun program lain yang berpeluang untuk menguatkan program inklusi di Desa. Di provinsi gorontalo sangat berpeluang berkolaborasi dengan program SKALA ( Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar ) yang programnya sangat berkaitan erat dengan kebutuhan kelompok rentan marginal. sehingga hal bisa berpeluang untuk menyusun RENCANA AKSI bersama untuk melakukan pendampingan program sesuai dengan tupoksi dan peran stakeholder di tingkat provinsi dan hal ini bisa menjadi program inovasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi untuk bisa kolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Dan Desa

Sehingga Sasaran, Target program Pemerintah Provinsi, daerah, Desa bisa dirasakan manfaat dan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa dan juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat terutama kelompok rentan marginal .

## **3. Strategi Keberlanjutan**

Salah satu aspek paling menonjol dari program ini adalah fokusnya pada keberlanjutan. Dengan mendorong regulasi inklusi sosial dan akuntabilitas di tingkat desa maupun kabupaten, program ini memastikan bahwa hasil yang dicapai tidak berhenti pada akhir periode pendampingan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen formal yang dapat mengikat semua pihak untuk terus mengintegrasikan inklusi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program pembangunan desa.

Pendekatan keberlanjutan lainnya adalah melalui penguatan kapasitas kader desa dan masyarakat. Dengan membangun kapasitas lokal, program ini mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pendamping eksternal. Dalam jangka panjang, kader dan masyarakat desa yang telah mendapatkan pelatihan melalui Sekolah Lapang akan menjadi penggerak utama dalam menjaga dan memperluas praktik inklusi sosial di desa masing-masing.

## **4. Tantangan dan Solusi**

Meskipun mencatat banyak keberhasilan, program ini juga menghadapi tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari beberapa pihak terhadap pendekatan inklusi sosial, terutama dalam konteks budaya lokal yang mungkin masih memprioritaskan kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi hal ini

program telah mengintegrasikan strategi komunikasi dan advokasi bertujuan mengubah persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya inklusi sosial.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan kapasitas di tingkat desa, baik dalam hal pengetahuan teknis maupun pemahaman tentang prinsip-prinsip inklusi sosial dan akuntabilitas. Dalam hal ini, Sekolah Lapang telah menjadi solusi efektif dengan memberikan pelatihan yang tidak hanya teoretis tetapi juga praktis. Pelatihan ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa.

Program P3PD Sub-Komponen 2B di Kabupaten Pohuwato berupaya membuktikan bahwa inklusi sosial dan akuntabilitas dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembangunan desa. Keberhasilan pelaksanaan Sekolah Lapang dan dorongan regulasi inklusi sosial menjadi fondasi kuat keberlanjutan program. Namun, untuk memaksimalkan dampak jangka panjang, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan kapasitas, pengembangan regulasi, dan integrasi program lintas sektor.

Melalui strategi yang holistik dan kolaboratif, Kabupaten Pohuwato memiliki peluang besar untuk menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan praktik pembangunan desa yang inklusif dan akuntabel. Dengan demikian, program ini tidak hanya berdampak pada kelompok sasaran tetapi juga menciptakan perubahan sistemik yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

## 12.2 Rekomendasi

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang di delapan desa dampingan selama 2023-2024, yang melibatkan berbagai tahapan pendampingan dan penentuan prioritas kegiatan dengan dukungan penguatan kader inklusi serta peningkatan kapasitas dan keterampilan kelompok rentan, berikut rekomendasi memastikan keberlanjutan dan perluasan dampak program:

- **Melalui Kementian Desa Mengoptimalkan Evaluasi Kinerja Pendamping Desa terkait pembangunan Desa Inklusi dan akuntabel**

Pendamping Desa sangat berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terutama kelompok rentan marginal terakomodasi dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa, Sehingga kegiatan -yang sudah disuport melalui kegiatan Sekolah lapang yang dilakukan melalui program P3PD Sub Komponen 2b di Desa Pilot maupun desa Non Pilot bisa maksimal terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Dana Desa maupunnon Dana Desa.

Dengan Adanya regulasi terkait Prioritas penggunaan Dana desa bisa memaksimalkan dan memprioritaskan kebutuhan kelompok rentan marginal dalam program prioritas yang akan diprogramkan di Desa, hal ini bisa menjadi strategi meningkatkan partisipasi kelompok rentan marginal dalam pembangunan

- **Penguatan Kapasitas Kader Inklusi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten dan Provinsi perlu memperkuat kapasitas kader inklusi melalui pelatihan lanjutan berfokus pada keterampilan pendampingan dan advokasi bagi kelompok rentan dan marjinal. Pendampingan intensif harus difokuskan pada pembekalan teknik fasilitasi dan pengorganisasian komunitas agar kader inklusi dapat menjalankan peran secara optimal di tingkat desa.

- **Pembentukan Forum Asosiasi Kader Inklusi**

Dinas PMD bersama pemerintah kabupaten dan provinsi perlu membentuk Forum Asosiasi Kader Inklusi sebagai wadah koordinasi, pertukaran pengetahuan, dan pembelajaran antar kader inklusi. Forum ini juga dapat menjadi sarana menyusun rencana aksi pendampingan yang terintegrasi dengan program pembangunan desa inklusi dan akuntabilitas di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Selain itu, asosiasi bisa berperan mengadvokasi kebijakan mendukung keberlanjutan program inklusi sosial.

- **Integrasi dalam Rapat Koordinasi Pendamping Desa dan Kader Inklusi**

Rapat koordinasi rutin antara pendamping desa (TA, PD, PLD) dan kader inklusi perlu diintegrasikan di tingkat kabupaten dan provinsi. Tujuannya untuk menyelaraskan tindak lanjut kegiatan pasca-Sekolah Lapang dengan prioritas pembangunan desa yang didanai melalui Dana Desa. Forum ini juga berfungsi mengidentifikasi peluang kolaborasi dan mengatasi hambatan implementasi di tingkat lapangan.

- **Strategi Keberlanjutan Program melalui Dinas PMD**

Dinas PMD di tingkat kabupaten dan provinsi harus merancang strategi keberlanjutan program yang sejalan dengan kebijakan daerah. Regulasi yang mendukung desa inklusi dan akuntabilitas harus disusun dan disahkan memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pelaksanaan program. Regulasi ini dapat mencakup pedoman pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan inklusi sosial, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta insentif bagi desa yang menunjukkan kinerja baik.

- **Pengembangan Desa Percontohan**

Delapan desa pilot yang telah didampingi selama 2023-2024 harus difasilitasi untuk menjadi desa percontohan dalam mengembangkan praktik inklusi sosial dan akuntabilitas. Desa percontohan ini perlu dilibatkan dalam proses pendampingan desa replikasi, baik melalui transfer pengetahuan maupun dukungan teknis. Pemerintah kabupaten dapat menyusun panduan praktik terbaik berdasarkan pengalaman desa pilot untuk disebarluaskan ke desa lain.

- **Kolaborasi Program melalui Dinas/OPD Daerah**

Kolaborasi lintas sektor melalui Dinas/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus diperkuat sebagai model pendampingan strategis. Program-program inklusi sosial perlu diintegrasikan dengan inisiatif daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah desa bersama kader inklusi dapat memanfaatkan kolaborasi mengakses sumber daya tambahan dan meningkatkan dampak program di komunitas mereka.

- **Penyusunan Modul Pelatihan**

Dinas PMD bekerja sama dengan lembaga pelatihan harus menyusun modul yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan kader inklusi dan masyarakat desa. Modul ini harus mencakup materi praktis seperti teknik pemetaan sosial, pengelolaan konflik, dan penggalangan dukungan komunitas berdasarkan pengalaman pengelolaan program.

- **Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)**

Dibentuk Pokja khusus yang melibatkan kader inklusi, pendamping desa, dan pemerintah daerah mengawal implementasi rekomendasi ini. Pokja ini bertugas memonitor kemajuan, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi secara kolektif.

- **Pemberian Insentif untuk Kader**

Pemerintah kabupaten dapat memberikan insentif kepada desa dan kader inklusi yang berhasil mengimplementasikan program inklusi sosial secara efektif. Insentif ini dapat berupa penghargaan, alokasi anggaran tambahan, atau kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan.

- **Peningkatan Komunikasi Publik**

Pemerintah daerah harus meningkatkan komunikasi publik terkait pentingnya inklusi sosial dan akuntabilitas melalui media lokal, diskusi publik, dan kampanye edukasi. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan komunitas.

- **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E)**

Sistem M&E yang komprehensif harus diterapkan guna memantau pelaksanaan program di tingkat desa, termasuk indikator keberhasilan seperti tingkat partisipasi kelompok rentan dan kualitas regulasi yang diterapkan.